

# Policy Brief Series

Issue 2 | Vol. 4 | 2021

Policy Brief series ini dibuat sebagai bagian dari proyek CONVEY Indonesia yang diselenggarakan oleh PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia, berkolaborasi langsung dengan lembaga riset.

CONVEY Indonesia dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme bernuansa kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset-survei, advokasi kebijakan, dan interaksi publik yang berbasis pada potensi Pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebhinekaan, dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

## MENYEMAI ASA: PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

### A. KONTEKS PENELITIAN

Tantangan Islam trans-nasional dan ekstremisme melanda hampir semua aspek kehidupan di Indonesia. Berbagai penelitian sudah dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat Islamisme masyarakat di berbagairanah. Di sektor pendidikan, penelitian PPIM (2018) menengarai bahwa kalangan guru hampir di semua level dari TK/RA hingga SMA terpapar intoleransi dan radikalisme. Penelitian CISForm (2019) juga mengafirmasi bahwa tingkat Islamisme mahasiswa-mahasiswa (calon guru) pada program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di 19 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam cukup tinggi.

Berangkat dari fenomena di atas, Center for the Study of Islam and Social Transformation (CISForm) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga berasumsi bahwa pengaruh Islamisme sudah masuk dalam proses pembelajaran di level Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terutama TK/RA. Oleh karena itu, CISForm mengadakan survei terkait pandangan keagamaan dan proses pembelajaran di TK/RA di tiga kota: Yogyakarta (diwakili oleh daerah Kotamadya Yogyakarta, Sleman dan Bantul), Solo Raya (meliputi wilayah Kotamadya Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, dan Karanganyar), dan Salatiga (meliputi semua kecamatan di Kota Salatiga dan beberapa kecamatan di Kabupaten Semarang yang menjadi penopang kota Salatiga). Hal ini ditindaklanjuti dengan penulisan modul dan penyelenggaraan pelatihan (capacity building) keagamaan bagi guru-guru TK/RA sebagai upaya untuk mereduksi tingkat ekstremisme dan radikalisme. Survei dilakukan CISForm pada 15-31 Desember 2020 secara daring, dan didasarkan pada teori Islamisme Bassam Tibi (2012) yang terdiri dari 6 kriteria/aspek yaitu 1) purifikasi

agama, 2) formalisasi Syariat Islam, 3) anti demokrasi, 4) anti agama lain, 5) anti Barat/Asing dan 6) penggunaan kekerasan. Satu hal lain yang tidak kalah penting, CISForm menambahkan beberapa pertanyaan terkait sensitivitas gender sebagai topik yang bersifat *cross-cutting*.

Dari sekitar 3.000-an guru PAUD yang dikontak secara acak di tiga kota tersebut, terdapat 631 responden yang bersedia mengikuti survei online--218 dari Yogyakarta, 262 dari Solo Raya, dan 151 dari Salatiga. Responden tersebut berasal 615 sekolah swasta dan 16 sekolah negeri. Sekolah swasta terdiri dari berbagai afiliasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah/'Aisyiyah, Al-Irsyad, Majelis Tafsir Al-Qur'an, serta gerakan Tarbawi, Salafi, dan non-keagamaan.

## B. ISLAMISME DI KALANGAN GURU PAUD

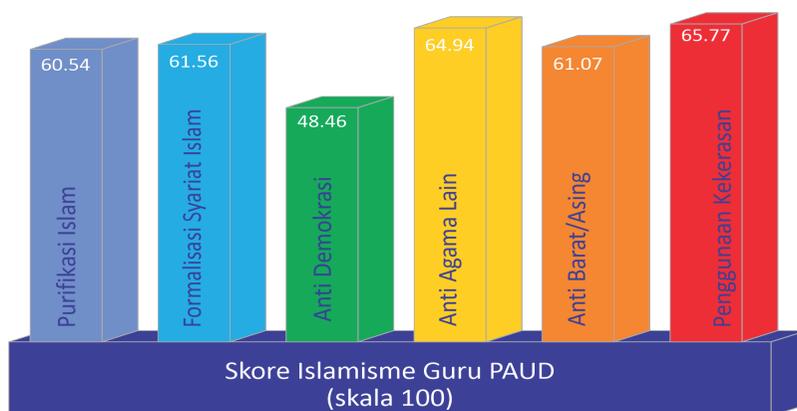


Figure 1. Skore Islamisme Guru PAUD

Berdasarkan enam aspek Islamisme Bassam Tibbi di atas, survei ini menunjukkan bahwa tingkat purifikasi Islam dan formalisasi Syariah guru-guru PAUD relatif sedang. Namun, dalam beberapa aspek, levelnya cukup tinggi. Misalnya, 25,99% dari mereka enggan membuka rekening di bank konvensional dengan alasan riba. Hal ini bisa jadi terkait dengan maraknya Gerakan anti-riba dan ex-bank di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, 58,16% mewajibkan jilbab panjang bagi anak. Dalam aspek anti-demokrasi level anti kebangsaan mereka cukup tinggi berdasarkan pilihan jawaban mereka bahwa: (1) Pancasila bertentangan dengan Islam (6,66%), (2) pemerintah adalah thoghut, sehingga tidak harus ditaati (5,55%), (3) hormat bendera

dapat merusak akidah (5,07%), dan (4) setiap Muslim berkewajiban menegakkan khilafah karena sistem yang lain dianggap kafir (19,33%).

Hubungan dengan agama lain juga menunjukkan Islamisme yang cukup tinggi. Meskipun guru yang mengajarkan murid untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama lain kecil (7,61%), namun 56,1% berpendapat bahwa mengucapkan selamat hari raya agama lain sama dengan menyetujui akidah mereka dan 62,7% melarang murid mengucapkan selamat hari raya terhadap umat beragama lain. Senada dengan hal tersebut, pandangan terhadap Barat/asing menunjukkan Islamisme yang cukup tinggi. Guru yang melihat bahwa semua negara Barat memusuhi Islam ada 36,13%, yang menganjurkan untuk memboikot produk-produk Barat ada 32,33%, dan yang berpendapat bahwa imigran Cina mendorong bangkitnya komunisme (PKI) ada 49,76%. Islamisme cukup tinggi juga ada pada penggunaan kekerasan. Terdapat 77,34% guru yang mendukung razia tempat-tempat maksiat oleh ormas Islam, dan 11,41% yang berpendapat bahwa anak membawa senjata pada pawai TK/RA dapat menumbuhkan semangat jihad.

Senada dengan temuan pada aspek lain, survei kami menunjukkan bahwa di satu sisi guru-guru PAUD tersebut sangat sensitive gender karena 91,6% mengatakan bahwa perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan. Namun, di sisi lain, terdapat 33,12% guru yang mengatakan bahwa jika terdapat murid TK/RA laki-laki dan perempuan, maka harus murid laki-laki. Hal ini merupakan temuan penting, sebab dimana nilai kesetaraan dan keadilan gender tidak bisa ditegakkan, maka nilai-nilai toleransi juga tidak akan berkembang.

### C. PEMBELAJARAN AGAMA DAN KEBANGSAAN

Ada perbedaan kurikulum antara TK umum dan TK Islam yang berada di bawah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan RA yang berada di bawah Kementerian Agama. Di TK umum, pendidikan Islam berada di bawah pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Adapun TK Islam materi keislamannya lebih banyak, lebih mirip RA, namun dengan konsep integrasi ilmu dan agama. Sedangkan RA, karena hakekatnya adalah sekolah keagamaan, mempunyai materi keislaman lebih banyak.

Hal di atas membuat suasana keagamaan di sekolah berbeda pula. Di TK umum materi keagamaan dikemas dalam bingkai kebangsaan, apalagi jika terdapat siswa non-Muslim. Oleh karena itu, di TK umum

secara umum pengembangan nilai dan sikap toleransi kepada siswa berjalan dengan baik, di antaranya melalui peringatan hari-hari keagamaan, yang dipergunakan untuk mengenalkan anak pada agama yang berbeda. Namun akhir-akhir ini terdapat kecenderungan penguatan PAI karena tuntutan pasar. Hal ini didorong oleh tren orang tua menyekolahkan anak mereka di TK Islam atau RA, karena mereka ingin agar anak mereka dapat beribadah dengan baik dan mempunyai akhlak mulia, di samping cakap dan pandai. Sehingga, di banyak TK umum, PAI menjadi nilai lebih yang ditonjolkan, termasuk juga penggunaan busana muslim/ah di sekolah, penguatan hafalan doa, surah pendek dan hadis. Di sini diperlukan guru PAI yang mempunyai latar belakang PAI, karena dalam praktiknya guru umum dengan pengetahuan keagamaan yang terbatas terpaksa harus mengajarkan PAI karena keterbatasan sumber daya manusia.

<b>Indikator Perilaku Anti Agama Lain</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>
Mengajarkan agar murid-murid TK/RA tidak bergaul dengan teman yang berbeda agama	7,61%	92,39%
Mengucapkan selamat hari raya kepada penganut agama lain sama dengan menyetujui akidah mereka	56,10%	43,90%
Melarang murid mengucapkan selamat hari raya untuk agama lain (misalnya Selamat Natal)	62,76%	37,24%

*Figure 2. Indicators of Islamisme on the Relations with other Religions*

Di RA, karena di bawah Kemenag banyak mengajarkan materi keislaman. Di TK Islam, terutama TKIT atau yang menggunakan model yang serupa, kurikulum yang diterapkan bersifat integratif antara agama dan ilmu pengetahuan, meskipun demikian dalam pelajaran umum pun diselipkan materi keislaman. Dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan, baik di TK Islam maupun di RA, tentu dengan perbedaan-perbedaan pendekatan antara keduanya, terdapat variasi: (1) Mengenalkan Pancasila dan menghapuskannya serta mengadakan upacara bendera dan penghormatan pada bendera merah-putih; (2) Mengenalkan Pancasila, tapi tidak menghapuskannya, dan mengadakan upacara bendera, baik dengan atau tanpa penghormatan pada bendera merah-putih; (3) Tidak mengenalkan Pancasila, tetapi nilai-nilai keislaman, dengan argumen bahwa karena nilai-nilai keislaman sejalan dengan Pancasila. Biasanya yang ketiga ini tidak mengadakan upacara bendera dan tidak ada hormat bendera.

Terkait kurikulum, mayoritas guru PAUD sudah mempelajari kurikulum pemerintah (99,21%). Namun, sebagian meyakini bahwa proses pembelajaran di TK/RA tidak semestinya mengikuti kurikulum pemerintah (7,77%), kurikulum pemerintah tidak mencukupi untuk rujukan pendidikan agama di TK/RA (11,25%), dan materi toleransi TK/RA dalam kurikulum pemerintah tidak sesuai dengan akidah Islam (14,42%).

Dari survei kita juga mendapatkan temuan bahwa pandangan pribadi guru mempunyai pengaruh signifikan pada cara mengajar dan konten pembelajaran. Ini artinya hitam putih pemahaman keagamaan siswa banyak dipengaruhi oleh pemahaman guru. Hal ini terbukti dari banyaknya guru yang bercerita dalam FGD/wawancara tentang bagaimana di rumah anak mengingatkan orang tua atau kakak mereka tentang pemakaian busana muslimah atau praktik keagamaan lain. Hal di atas menunjukkan penting untuk memberikan wawasan yang luas kepada guru terkait wasathiyah Islam dan toleransi beragama.

Oleh karena itu, kami membuat modul pelatihan berdasarkan temuan survei dan FGD yang kami lakukan. Modul ini juga meminta masukan berbagai pihak melalui FGD dengan stakeholders, seperti dari Subdit PAUD, Direktorat PAI Kementerian Agama, Direktorat GTK PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama Provinsi, Kota/Kabupaten (di wilayah survei), Asosiasi-asosiasi Guru TK dan RA (IGABA, IGRA, IGTKI), Forum Komunikasi Guru PAI di TK (nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota), Akademisi (prodi PIAUD IAIN/UIN). Modul itu memuat tujuh nilai penting, yaitu: (1) Kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah; (2). Mewujudkan Kehidupan Religius di Sekolah; (3) Menyemai Tunas Bangsa; (4) Islam Agama Rahmat; (5) Merangkul yang Berbeda; (6) Menghidupkan Nilai-Nilai Keagamaan di PAUD. Setelah itu kami melakukan uji coba pelatihan Penguatan Kapasitas dan Penanaman Nilai Keagamaan Guru TK/RA yang kami lakukan pada 12 dan 13 Februari 2021 di tiga kota--Yogyakarta, Surakarta dan Salatiga--dengan melibatkan 100 guru yang sebelumnya mengikuti survei dan FGD kami. Pelatihan yang menggunakan pendekatan andragogis ini disambut antusias oleh para guru TK/RA di tiga kota tersebut.

Dalam pelatihan ini kami mengadakan pre-test dan post-test. Dari kedua tes ini didapatkan bahwa pelatihan ini cukup efektif untuk memberikan pengayaan pandangan keagamaan yang moderat dan pandangan kebangsaan yang lebih inklusif dan toleran. Hal ini terbukti dari hasil kedua tes ini menunjukkan perubahan pemahaman keagamaan dan kebangsaan ke arah yang lebih positif dengan penurunan skor Islamisme rata-rata 7,96%.

### C. REKOMENDASI KEBIJAKAN

- 1) Survei kami menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan dan kebangsaan guru sangat menentukan pembelajaran (cara dan muatan). Oleh karena itu pembinaan pandangan keagamaan dan wawasan kebangsaan bagi guru TK/RA dalam bentuk pelatihan, workshop, dan pengayaan lainnya perlu ditekankan (jika tidak diwajibkan), baik oleh guru keagamaan (PAI) maupun guru kelas (umum), karena pelajaran umum di TK Islam yang menerapkan pendekatan integratif diajarkan pula materi keislaman.
- 2) Pelatihan moderasi beragama terhadap guru TK/RA dengan pendekatan andragogis yang sekaligus menguatkan wasathiyah Islam dan semangat kebangsaan tersebut di poin 1 dilakukan dengan melibatkan ormas-ormas Islam moderat dan perguruan-perguruan tinggi keagamaan (STAIN, IAIN, UIN). Walaupun kami menyadari bahwa pelatihan bukan merupakan satu-satunya cara untuk menguatkan moderasi beragama, namun dengan materi yang tepat, pelatihan ini dapat menjadi media yang efektif dalam pengayaan pemahaman keagamaan yang moderat dan nilai kebangsaan yang toleran.
- 3) Perlu sosialisasi kurikulum pemerintah untuk TK/RA yang lebih intensif dengan berbagai pendekatan yang dapat diterima, karena ditemukan bahwa walau mayoritas (99,21%) guru PAUD sudah mempelajari kurikulum pemerintah, sebagian (7,77%) meyakini bahwa proses pembelajaran di TK/RA tidak semestinya mengikuti kurikulum pemerintah, kurikulum pemerintah tidak mencukupi untuk rujukan pendidikan agama di TK/RA (11,25%), dan materi toleransi TK/RA dalam kurikulum pemerintah tidak sesuai dengan akidah Islam (14,42%). Selain mengintensifkan diseminasi dan pembinaan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, diperlukan pula implementasi kurikulum yang termonitor dan mekanisme resmi yang dikaitkan dengan akreditasi sekolah ataupun sertifikasi guru.
- 4) Perlu ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang khusus terkait penanaman nilai kebangsaan di PAUD, atau setidaknya merevisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang "Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini," Pasal 5 Ayat 1 dengan memasukkan "nilai kebangsaan/nasionalisme" dalam struktur kurikulum PAUD. Hal ini dapat juga dilakukan dengan merevisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2018 tentang "Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini," Pasal 11 dengan menambahkan kontrol kurikulum kebangsaan sebagai bagian dari tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah.

- 5) Terkait dengan wawasan kebangsaan dan Pancasila, pemerintah perlu secara lebih eksplisit mewajibkan pengenalan Pancasila, menghafalkan sila-silanya, nilai-nilainya, dan menyelenggarakan upacara bendera merah putih setidaknya seminggu sekali, juga menghafalkan lagu-lagu nasionalisme.
- 6) Memasukkan Sirah Nabawiyah dalam kurikulum penting untuk meneladani akhlak Rasulullah. Sirah Nabawiyah ini lebih ditekankan pada narasi-narasi yang mencerminkan etika sosial, kemanusiaan, harmoni, kerjasama, toleransi, dan kasih-sayang, bukan pada narasi peperangan.
- 7) Walaupun secara umum sensitivitas gender Guru-guru PAUD tampaknya sudah cukup tinggi, seringkali hal tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan praktis. Pandangan bahwa murid laki-laki dan perempuan tidak perlu dipisah dalam kelas, misalnya, seringkali disebabkan oleh kecilnya jumlah murid sehingga tidak memungkinkan pembagian menjadi dua kelas yang terpisah. Namun untuk membangun pemahaman yang kuat tentang kesetaraan dan keadilan gender, yang akan mempengaruhi pandangan mereka tentang toleransi, dibutuhkan training yang komprehensif tentang hal tersebut yang berdasar pada Quran dan Sunnah. Hal ini dapat dikerjasamakan dengan Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak pada beberapa PTKI.
- 8) Dalam penelitian ini ditemukan bahwa guru kekurangan bahan ajar keagamaan yang ramah dan materi kebangsaan yang menarik bagi anak. Oleh karena itu perlu diperbanyak bahan ajar termasuk video dan media pembelajaran semacamnya yang mudah disebar lewat sosial media.
- 9) Beberapa dinas pendidikan mewajibkan guru dan siswa TK, termasuk TK Islam, menggunakan pakaian tradisional pada hari-hari tertentu. Hal ini perlu juga dilakukan di RA di bawah Kementerian Agama dan dilakukan secara nasional. Sekolah diperkenankan memberikan interpretasi keagamaan terhadap pakaian tradisional itu, misalnya pakaian adat yang dipadukan dengan jilbab.



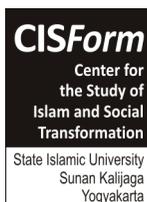
## Empowering Educational Actors and Institutions to Promote Religious Moderation in PVE

Gedung PPIM UIN Jakarta, Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten  
15419 Indonesia

Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: [pmu.convey@gmail.com](mailto:pmu.convey@gmail.com)

Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:



*Empowered lives.  
Resilient nations.*